

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan bagian dari sistem kehidupan sosial masyarakat yang cukup lama keberadaannya. Dilihat dari sisi kesejarahan, seperti sistem irigasi yang menjadi fenomena di Indonesia. sejak zaman kerajaan sebelum penjajahan Belanda itu sudah dijalankan. Sehingga ketika ada pihak-pihak yang membicarakan kebijakan sistem irigasi, siapapun pihak tersebut, perlu selalu berpijak pada realitas sistem irigasi yang telah ada.

Sebagai negara agraris, sektor pertanian merupakan sektor penting sebagai penopang perekonomian nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian. Namun demikian hasil yang diharapkan dari sektor pertanian belum optimal. Hal itu ditunjukkan dengan masih belum mencukupinya hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut juga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat petani rendah.

Irigasi di Indonesia telah memberikan kesempatan bagi petani untuk menumbuhkan kelembagaan-kelembagaan, pengelola air secara tradisional. Apabila sarana fisik sebuah jaringan irigasi merupakan perangkat kerasnya, maka lembaga-lembaga tersebut, baik yang formal maupun yang tidak formal merupakan perangkat lunaknya, yang mutlak diperlukan untuk mengelola air sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga yang telah dikembangkan oleh petani itu merupakan sumber daya yang sangat berharga, patut dipelajari agar potensi

sumberdaya alam yang diatur dalam sistem irigasi akan memakmurkan penghuni wilayah dan dapat terus ditingkatkan.

Sistem irigasi adalah salah satu upaya Belanda dalam melaksanakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada tahun 1830. Pemerintah Hindia Belanda dalam Tanam Paksa tersebut mengupayakan agar semua lahan yang dicetak untuk persawahan maupun perkebunan harus menghasilkan panen yang optimal dalam mengeksplotasi tanah jajahannya.

Tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (*een eerschuld*) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program *Trias Van deventer* yang meliputi irigasi, Emigrasi dan Edukasi.

Kebijakan politik etis oleh Pemerintah Belanda sangat berpengaruh terhadap pembangunan irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dengan melakukan pemindahan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja Rodi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang diperlukan melakukan agro-industri untuk menopang prasarana bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Perkembangan irigasi teknis di Indonesia lahir bersamaan dengan pelaksanaan tanam paksa (*Cultuurstelsel*) yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk mengeruk keuntungan dan menambal hutang akibat Perang Diponegoro (1825-1830). Tebu merupakan tanaman budidaya yang paling

memberikan keuntungan pada waktu itu, namun setelah wabah kelaparan pada 1840-1850-an, pemerintah kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya pada pengairan untuk padi. Para insinyur Belanda pada waktu itu mengagumi sistem irigasi tradisional yang telah berkembang di Jawa.

Sistem pengelolaan irigasi pada masa kolonial Belanda telah meninggalkan dasar-dasar pengelolaan irigasi modern terhadap kita sekarang. Dapat dilihat perkembangan yang terjadi dimasa orde baru, sistem tersebut dilestarikan untuk memulihkan ekonomi masyarakat.

Lahirnya UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air, mulai pasal 13 sampai dengan pasal 19 telah mengatur wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Sedangkan dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, secara khusus pada UU tersebut diatur dalam pasal 41, ayat (2), yang di penjelasan diuraikan bahwa daerah irigasi dengan luas kurang dari 1000 hektar, dan ada dalam satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Daerah irigasi dengan luas areal 1000 – 3000 hektar atau daerah irigasi dengan luas areal kurang dari 1000 hektar dan lintas wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi juga sesuai dengan pedoman-pedoman normatif seperti UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, Kep. Menkimpraswil No. 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan

Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kep. Mendagri No. 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A dan PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang., untuk pemberdayaan masyarakat telah diupayakan untuk dilakukan, meskipun secara bertahap. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dilakukan dengan mulai mengelola jaringan tersier yang bersinggungan langsung dengan kepentingan petani yang diakomodasi melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Daerah Irigasi Gorontalo yang terdiri atas 4 (empat) Kabupaten sebenarnya memiliki P3A tersendiri untuk masing-masing kabupaten dan tergabung dalam P3A Gabungan. Namun demikian organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik dan aktif dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Persoalan-persoalan tersebut timbul karena adanya masalah klasik seperti tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang relatif rendah. Hal ini juga terkait dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Gorontalo. Selain itu dapat juga karena perhatian, pembinaan dan sosialisasi pemerintah daerah serta dinas terkait yang kurang dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Berbagai persoalan yang timbul di Daerah Irigasi tersebut perlu adanya suatu identifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dan upaya-upaya peningkatannya. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui kondisi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi di Provinsi Gorontalo. Memperhatikan ketersediaan sumberdaya air (irigasi dan air tanah) maka ke depan

Gorontalo masih membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan pertanian sebagai salah satu program unggulan daerah.

Dari pemaparan diatas penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi tema penelitian dengan memfokuskan pada penelitian irigasi. Dengan formulasi judul "*Irigasi di Gorontalo Abad XX*"

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Untuk memfokuskan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menghindari terjadinya kerancuan dalam perinterpretasian, maka perlu pembatasan masalah penelitian yang mencakup :

✓ *Scope* Kajian

*Scope* kajian disini menunjuk pada bidang atau yang akan dikaji adalah mengenai perkembangan irigasi di Gorontalo, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada sejarahnya.

✓ *Scope* Spasial

*Scope* spasial menunjuk pada tempat yang menjadi objek penelitian yaitu di Gorontalo . Dengan adanya batasan tempat ini maka akan lebih mudah untuk mengetahui gambaran, serta mendapatkan data-data penelitian yang sesuai, akurat dan lebih dapat dipercaya kebenarannya.

✓ *Scope* Temporal

Secara temporal pembahasan penelitian adalah pada abad XX dengan demikian rentetan periode ini sudah representatif untuk ditelaah secara ilmiah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan irigasi di Gorontalo abad XX?
2. Apa peran masyarakat (Petani) dalam pengelolaan irigasi?
3. Bagaimana dampak pembangunan irigasi di Gorontalo?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dan manfaat yang di harapkan dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui perkembangan irigasi di Gorontalo abad XX.
2. Mengetahui Peran Masyarakat (Petani) dalam pengelolaan irigasi.
3. Mengetahui dampak pembangunan irigasi di Gorontalo.

### **1.5 Kerangka teoritis dan pendekatan**

Penelitian sejarah diperlukan pendekatan yang relevan untuk membantu mempermudah usaha dalam mendekati realitas masa lampau. Guna mempertajam analisa dalam permasalahan ini digunakan pendekatan ilmu sosial yaitu teori pembangunan, teori evolusioner, teori siklus dan teori perkembangan.

Alasan mendasar mengapa dalam penelitian ini menggunakan empat teori yang telah di sebutkan di atas, karena keempat konsep di atas lebih representatif dalam mengkaji masalah yang menyangkut irigasi. Adapun konsep yang dikaji adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Teori Pembangunan (*development*)**

Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.<sup>1</sup>

Teori pembangunan diproduksi oleh para teoritis yang mempunyai beragam sudut pandang dan mereperentasikan banyak kepentingan. Teori pemabngunan yang dominan merepresentasikan kepentingan yang dominan dalam sebuah kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

Uraian diatas dapat dipahami bahwa kemuculan teori pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan dan konteks sosial yang berpengaruh besar pada zaman tersebut karena sebagai kritik terhadap zaman feodal yang didominasi

---

<sup>1</sup> [http://prasetyowidi.wordpress.com/03/Januari\\_2010\\_Dunia\\_Dalam\\_Genggaman\\_Satu\\_Site.htm](http://prasetyowidi.wordpress.com/03/Januari_2010_Dunia_Dalam_Genggaman_Satu_Site.htm) di uduh tanggal 10 Januari 2013

<sup>2</sup> Diktat teori pembangunan, penulis Yanuardi, 2012. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm. 7

oleh kaum bangsawan, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat posisi kaum kapitalis. Pendekatan teori ini menekankan pada pentingnya sistem irigasi sebagai indikator dalam pembangunan. Pendekatan ini berpendapat untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, sebab sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pertanian khususnya di Gorontalo.

### **1.5.2 Teori Evolusioner**

Teori evolusioner menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai berikut. *Pertama*, teori evolusi menggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Dimana masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. *kedua*, teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektif tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Teori evolusioner memiliki paham bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Semua masyarakat melalui urutan pertahapan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan awal menuju tahap perkembangan akhir. Di samping itu teori evolusioner mengatakan bahwa manakala tahap terakhir telah dicapai, maka pada saat itu perubahan evolusioner pun berakhir.

Teori Evolusi Pertanian Dikemukakan oleh William Collier (1996) yang menyatakan bahwaketerlambatan dalam pembangunan pertanian disebabkan oleh hambatan faktor-faktor ekonomi seperti terbatasnya luas lahan, modal, dan kesalahan kebijakan pemerintah yang menganggap bahwa petani di Indonesia masih terbelakang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.scribd.com/doc/130811603/BAB-I> di unduh tanggal 10 Januari 2013



Penjelasan diatas menguraikan bahwa Teori evolusioner memiliki paham perubahan sosial yang tetap dan dilalui oleh semua masyarakat melalui urutan pertahapan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan awal menuju tahap perkembangan akhir. Di samping itu teori evolusioner mengatakan bahwa manakala tahap terakhir telah dicapai, maka pada saat itu perubahan evolusioner pun berakhir

### **1.5.3 Teori Siklus**

Perubahan sebagai suatu siklus karena sulit diketahui ujung pangkal penyebab awal terjadinya perubahan sosial. Perubahan yang terjadi lebih merupakan peristiwa prosesusual dengan memandang sejarah sebagai serentetan lingkaran tidak berujung. Ibn Khaldun, salah satu teoritisi sosiohistoris mengemukakan bahwa perubahan sebagai suatu siklus, yang analisisnya memfokuskan pada bentuk dan tingkat pengorganisasian kelompok dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Para penganut teori siklus juga melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh masyarakat, tetapi mereka berpandangan bahwa proses peralihan masyarakat bukannya berakhir. Pada tahap terakhir yang sempurna melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya.

Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Pandangan teori siklus ini, yaitu perubahan sosial sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Apa yang terjadi

sekarang akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang ada di zaman dahulu. Di dalam pola perubahan ini tidak ada proses perubahan masyarakat secara bertahap sehingga batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern tidak jelas.<sup>4</sup>

Uraian diatas dapat dipahami bahwa masyarakat mempunyai sifat yang dinamis, ia selalu ingin berkembang dan berubah. Irama perubahan tersebut ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat karena dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan ekonomi. Akibatnya pola-pola interaksi yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat pun semakin kompleks

#### ***1.5.4 Teori perkembangan (linear)***

Perubahan sebagai perkembangan (*linear*) pada dasarnya setiap masyarakat walau secara lambat namun pasti akan selalu bergerak, berkembang, dan akhirnya berubah dari struktur sosial yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks maju dan modern.

Perubahan sosial mengikuti pola linear seperti dikemukakan oleh Auguste Comte. Dia mengatakan bahwa kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tak terletakkan. Perubahan selalu berubah dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks, selalu berubah menuju arah kemajuan.<sup>5</sup> Teori linear menganggap bahwa perkembangan sejarah itu mengikuti

---

<sup>4</sup>[http://www.artidefinisi.com/2012/06/teori-perubahan-sosial-siklus\\_dan.html#ixzz2JGugoRBy](http://www.artidefinisi.com/2012/06/teori-perubahan-sosial-siklus_dan.html#ixzz2JGugoRBy) di uduh tanggal 10 Januari 2013

<sup>5</sup> <http://as-sosunila.blogspot.com/2012/11/teori-perubahan-pola-linear.html> di uduh tanggal 10 Januari 2013

sebuah garis lurus atau linear, jadi masa lalu atau the past akan menjadi masa kini dan pada akhirnya akan menjadi future atau masa yang akan datang.

Perubahan sebagai perkembangan (*linear*) adalah bahwa pada dasarnya setiap masyarakat walau secara lambat namun pasti akan selalu bergerak, berkembang, dan akhirnya berubah dari struktur sosial yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks maju dan modern

### **1.6 Tinjauan Pustaka dan sumber**

Pengumpulan data dan sumber merupakan langkah yang penting untuk kelengkapan penyusunan historiografi nanti. Adanya sumber tentunya sangat berpengaruh terhadap proses historiografi karena tidaklah mungkin kita merekonstruksi sebuah sejarah apabila bahan – bahannya (sumber) tidak tersedia. Kalaupun bisa, mungkin rekonstruksi itu tidak akan utuh dan kokoh. Pentingnya sebuah sumber ini dibuktikan dengan metode sejarah yang menempatkannya pada tahap pertama penelitian sejarah atau lebih kita kenal dengan heuristik.

Pada penelitian sejarah ini, penulis menggali sumber dari : Lani Puspita, dkk dalam buku *Lahan Basah Buatan di Indonesia*. (2005) buku ini membahas mengenai lahan basah buatan di Indonesia meningkatkan produksi lahan pertanian dan perikanan, pembangkit tenaga listrik, sumber air, atau untuk meningkatkan keindahan bentang alam bagi keperluan pariwisata. Selain itu buku ini juga membahas proses pembuatan bendungan dan bendungan waduk Sebelum tahun 1942 pembangunan waduk di Indonesia hanya ditujukan sebagai penampung air bagi kegiatan pertanian (*Single-purposed Dam*). Setelah tahun 1950 barulah dibangun waduk-waduk berukuran besar yang ditujukan bagi berbagai keperluan

(*Multi-purposed Dam*). Sekarang ini pembangunan waduk terutama bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan (terutama beras) melalui irigasi dan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui tenaga listrik (PLTA) yang dihasilkannya. Walaupun sebenarnya pembangunan waduk ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, namun ternyata banyak aspek negatif yang timbul berkaitan dengan pembangunan waduk besar, baik dampak sosial maupun lingkungan (*Indonesian National Committee on Large Dam*).<sup>6</sup>

Arsip : Seri Modul No : PPA 1/22, *Pengenalan Sistem Irigasi* (2006). Buku ini membahas pengenalan sistem irigasi pada abad pertengahan 19 oleh pemerintahan Belanda mulai membuka perkebunan-perkebunan tebu tembakau serta dilengkapi dengan sistem irigasi. Tujuan utama pembangunan sistem irigasi tersebut adalah untuk menjamin keberhasilan produksi tanaman milik pemerintah atau swasta kolonial Belanda.<sup>7</sup> Dan pada masa pemerintahan Orde baru, dilaksanakan pembangunan rehabilitasi irigasi secara besar-besaran.

Abdullah Angoedi *sejarah Irigasi diIndonesia* (1984) buku ini membahas irigasi di Indonesia mulai dari zaman prasejarah sampai awal kolonialisme Belanda melakukan pembangunan proyek-proyek irigasi. Pada awal abad XX Pemerintah Hindia Belanda menarik simpati rakyat Indonesia melalui politik etis yang diselenggarakan yaitu *Educatie*, *Transmigratie* dan *Irigatir*.<sup>8</sup> Di samping itu kajian referensi, penulis mengakses internet dan Arsip baik itu ANRI maupun arsip

---

<sup>6</sup> Lani Puspita, dkk. 2005. *Lahan Basah Buatan di Indonesia*. Bogor: Wetlands International – IP. Hlm 107

<sup>7</sup> Arsip: Seri Modul No : PPA 1/22, 2006 *Pengenalan Sistem Irigasi*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Hlm. 6

<sup>8</sup> Ir. Abdullah Angoedi. 1984. *sejarah Irigasi diIndonesia*. Bandung : ICID. Hlm 115

tingkatan Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat. Di samping itu kajian refensi, penulis mengakses internet dan Arsip baik itu ANRI maupun arsip tingkatan Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.

### **1.7 Metode penelitian**

Suatu penulisan yang bersifat ilmiah mustahil dilakukan tanpa didukung dengan keberadaan fakta-fakta. Apalagi penelitian sejarah keberadaan fakta sangat diperlukan, dianalisis dan dikembangkan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau sedangkan fakta tidak mungkin ditemukan tanpa tersedianya data. Berasal dari data-data itulah fakta dapat ditemukan setelah melalui proses interpretasi sedangkan data baru dapat ditemukan setelah melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber sejarah.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah ini terdiri dari 4 tahap yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahapan kegiatan yang disebut terakhir sebenarnya bukan kegiatan penelitian, melainkan kegiatan penulisan sejarah (penulisan hasil penelitian).

#### ***1.7.1. Heuristik***

Sumber untuk penulisan sejarah ilmiah bukan sembarang sumber, tetapi mencari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini. Dengan metode sejarah itulah akan dikaji keaslian sumber data sejarah, kebenaran informasi sejarah. Sumber-sumber yang berupa sumber primer maupun sekunder yaitu buku-buku, majalah, artikel, koran-koran, dan internet yang terkait dengan sejarah

irigasi di Gorontalo abad XX. Kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya pencarian sumber pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti terhadap sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis pengumpulan sumber. Ada dua sumber yang penulis gunakan yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber asli yang berupa data atau dokumen serta informasi yang berkaitan dengan peristiwa dalam penulisan ini, sedangkan sumber sekunder adalah sumber penunjang berupa buku, majalah, Koran, dan internet, yang berkaitan dengan penulis

### ***1.7.2. Kritik Sumber***

Setelah data atau sumber sudah dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menelaah dan mengkritik sumber-sumber yang ada.<sup>9</sup> Dalam mengkritik ini penulis memakai dua aspek yaitu aspek eksternal dan internal, aspek eksternal adalah yang mempersoalkan apakah sumber itu memberikan informasi yang kita perlukan. Sedangkan internal dimulai setelah kritik eksternal memastikan sumber itu atau dokumen yang kita pakai adalah sumber yang benar.

Kritik Sumber ini adalah langkah selanjutnya setelah langkah pengumpulan sumber dilakukan. Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber dengan cara melakukan kritik. Kritik dilakukan dengan memakai kerja intelektual dan rasional dan mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan obyektifitas suatu kejadian. Selanjutnya kritik sumber itu terdiri dari kritik eksternal yang mengarah pada relasi antar sumber, dan kritik internal yang mengacu pada kredibilitas sumber.

---

<sup>9</sup> Abd. Rahman Hamid dan Muhamad Saleh. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. Hal 47

Sumber yang di kritik dalam penulisan ini mencakup dua aspek yaitu sumber primer dan sekunder, kemudian untuk menguji keabsahannya dilakukan dua kritik sumber yaitu secara eksternal dan internal,

- Eksternal : yaitu melihat keaslian dari dokumen yang penulis ambil baik dari segi pengarang, sampul buku, tulisan, dan gaya bahasanya.
- Internal : yaitu darimana sumber itu penulis dapatkan, perpustakaan, atau arsip daerah maupun nasional

### ***7.1.3. Interpretasi***

Sebelum sampai pada tahap historiografi, terlebih dahulu fakta sejarah tersebut digabung-gabungkan berdasarkan objek penelitian, dalam kajian sebagai kriteria menggabungkan data sejarah yang berkaitan dengan tema agar tidak mengganggu peneliti untuk merekonstruksi peristiwa.<sup>10</sup>

Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

Fakta dimaksud adalah fakta-fakta yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Fakta-fakta itu bisa dijadikan sumber sejarah yang perlu dikaji secara ilmiah menurut metode ilmu sejarah. Fakta tersebut berupa: (1) Mantifact, yaitu suatu yang diyakini masyarakat bahwa sesuatu itu memang ada, (2) Artefact, yaitu

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 49-50

sebagai jenis bangunan dan benda peninggalan arkeologi, (3) sosiofact, yaitu berbagai jenis interaksi dan aktifitas masyarakat.

Sehingganya bahwa proses interpretasi yang terdiri dari dua langkah yaitu analisis atau menguraikan data-data yang telah terverifikasi, dan selanjutnya adalah sintesis atau proses penyatuan data sejarah menjadi sebuah konsep.

#### ***7.1.4. Historiografi***

Historiografi merupakan penulisan sejarah dengan merangkaikan fakta-fakta sebagai sumber, kemahiran menulis dan kemahiran menstruktur fakta-fakta dalam bentuk tulisan sejarah menjadi kisah sejarah berdasarkan data-data yang sudah dianalisa.

Penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian dari metode penulisan sejarah. Tahap heuristic, kritik sumber, serta interpretasi kemudian dielaborasi sehingga menghasilkan sebuah historiografi. Dimana seorang peneliti mulai menulis sejarah dari data-data yang ada dan telah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. dalam penulisan sejarah umumnya sangat memperhatikan aspek kronologis agar hasilnya dapat menarik dan sistematis. Yang sehingganya bahwa dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk dasar teknik tulis menulis yaitu deskripsi, narasi dan analisis.<sup>11</sup>

Penjelasan ini dapat dipahami bahwa sesungguhnya dalam menulis sejarah merupakan gabungan dari berbagai teknik penulisan sehingga menghasilkan karya yang menarik sekaligus ilmiah. Disinilah pemahaman dan interpretasi atas fakta sejarah itu ditulis dalam bentuk kisah sejarah yang menarik dan logis.

---

<sup>11</sup> Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak. Hlm 121